

# RENCANA KERJA (RENJA) 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BONE



DINAS SOSIAL

JL. ANDALAS NO. 49 KEL. JEPPE'E KEC. T.R BARAT

KOTA WATAMPONE

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE

Sekretariat :

Jl. Andalas No. 49 Telp./Fax. 0481-21029

Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanette Riattang Barat 92732

Watamponge Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya serta tuntunan-Nya sehingga penyusunan **Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2022 dapat terselesaikan. Hal ini sebagai suatu langkah awal untuk mewujudkan penyelenggaraan Good Governance dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial.

**Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan kebijakan publik mengenai sistem perencanaan dibidang kesejahteraan sosial yang mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA - SKPD dan selanjutnya menjadi DPA - SKPD karena memuat arah kebijakan pembangunan tahun berikutnya dengan berpedoman pada tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yakni **“Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud melalui **Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Sosial Kabupaten Bone kiranya dapat menjadi nilai tambah dan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya dan dapat membenahi kekurangan yang ada untuk menyusun dokumen yang lebih baik lagi.

Watampone, 27 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Bone,



**H. A. ARSYAD, S.H., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19620110 199101 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra Perangkat Daerah ...	12
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	29
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	34
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	69
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	74
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	74
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	76
3.3. Program dan Kegiatan .....	78
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	98
BAB V PENUTUP .....	99

## DAFTAR TABEL

2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone	13
2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone	31
2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone	35
2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone	71
3.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	77
3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone	84



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Proses pemerintahan kian tahun kian mengalami perkembangan. Perubahan paradigma pemerintahan yang baru yang kian menuntut kinerja aparatur yang transparan, akuntabel demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good government*), serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perkembangan pemerintahan yang kian terus berpacu menuntut Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja harus dimulai dari sistem perencanaan yang baik, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tingkat pengawasan berupa monitoring dan evaluasi.

Paradigma pemerintahan yang lama hanya menitikberatkan sistem pengawasan (monitoring dan evaluasi) dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, tetapi sekarang aparatur mulai dievaluasi mulai dari sistem perencanaan sampai pada tahap akhir pelaksanaan kegiatan, termasuk sistem penganggaran. Sehingga dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian tujuan, maka dibutuhkan sebuah proses perencanaan yang matang.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun ditetapkan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD. Dalam sebuah Instansi Pemerintahan, setiap perencanaan dituangkan dalam sebuah Rencana Kerja (RENJA). Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) adalah suatu perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD) serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya atas penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun sebelumnya. Termasuk acuan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Termasuk juga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mau tak mau harus menjadi pedoman seluruh Organisasi Perangkat Daerah bagi provinsi, kabupaten/kota dalam menyusun program dan kegiatan termasuk penambahan item baru yakni sub kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) merupakan penjabaran dari rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja yang dilakukan oleh PD harus diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Bone Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Serta Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone karena Renja merupakan penjabaran Renstra yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang secara teknis dilakukan oleh PD teknis masing-masing, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengahDaerah. Penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagai berikut :

- Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD).
- Pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

#### 1.1.1. Pengertian Renja

Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi

untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bone yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

#### 1.1.2. Mekanisme penyusunan Renja

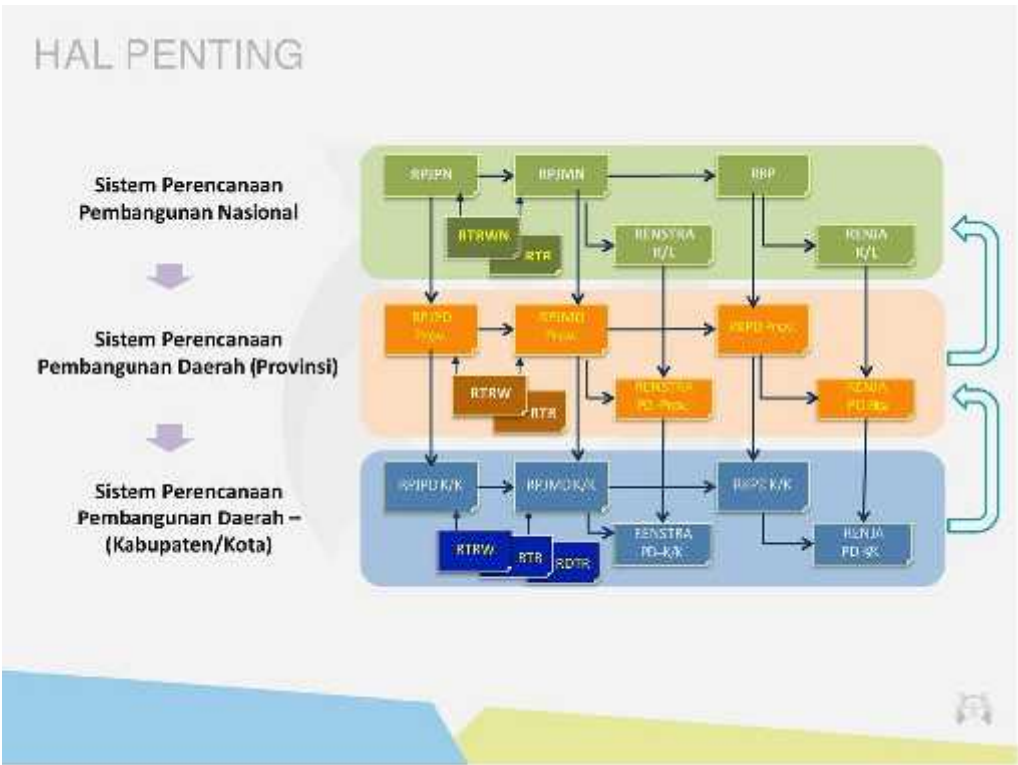
Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja PD menjadi mutlak, yaitu Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone 2022 harus disinkronisasikan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi. Pembahasan Renja PD pada Forum PD Kabupaten/Kota Musrenbang kecamatan Musrenbang Desa Pengesahan Renja-PD oleh Bupati Bone. Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan Rencana Kerja Dinas



Sosial Kabupaten Bone 2022 dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.1.3. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah

Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan Sistem Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:



1.2. Landasan Hukum

Pada dasarnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dilaksanakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan

pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (Amnibus Regulation) dari berbagai Undang-Undang sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara.
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2010-2014.
11. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Sosial atau Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone
26. Peraturan Bupati Bone Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
28. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan capaian prestasi sebagai tolok ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan tujuannya yaitu harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan anggaran satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh

masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dananya.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2018 -2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone Tahun 2022. Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Renja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kab. Bone.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan strategi & kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**Visi: “Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Untuk merealisasikan visi dan memberikan arahan tentang tujuan yang akan diwujudkan serta untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bone, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

**Misi:**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:



1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Hal ini merupakan bentuk sinkronisasi dokumen perencanaan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan oleh Bupati Bone terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2022 sebagai bagian dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan sebagai berikut;

1. Menjadi acuan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran (RKA-PD) Dinas Sosial Kab. Bone pada Tahun 2022,
2. Menetapkan target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. Bone sebagai acuan pengukuran realisasi capaian kinerja pada tahun 2022,
3. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan prioritas serta Pagu Anggaran Dinas Sosial Kab. Bone dengan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Bone yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan** : Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

**Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu** : Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

**Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah** : Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah** : Menyajikan gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**Bab 5 Penutup** : Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk menjamin pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 yang berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi juga dimaksudkan guna menjaga kesinambungan dan sekaligus melihat secara realita program yang bermanfaat dan efektif kepada masyarakat dan menjadi acuan pertimbangan bagi program kegiatan yang tak terealisasi dalam upaya penyusunan Program dan Kegiatan berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja atas tujuh (7) sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan antara Inspektur Daerah Kab. dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun lalu adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

N O	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Ket.
							5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x 100 %		14 = 6 + 12		15 = 14 /5 x 100%			
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	17
					Urusan Pemerintahan Daerah																	
					Bidang Urusan Sosial																	
1					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)	100	3,585,000,000	164.96	545,056,500	-	660,500,000	329.67	594,318,550	-	89.98	494.63	1,139,375,050	494.6	31.8	DINAS SOSIAL	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa komunikasi (telepon/Faximile/Inte rnet, TV Kabel dan Air) (Rekening)	300	340,000,000	60.00	39,089,500	60	60,000,000	60.00	44,633,350	100.00	74.39	120.00	83,722,850	40.0	24.6		
					Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayarkan (STNK)	98	50,000,000	-	-	16	7,500,000	16.00	39,429,200	100.00	525.72	16.00	39,429,200	16.3	78.9		

				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi/Jasa Teknis lainnya yang mendapatkan jasa keuangan (orang)	1,560	570,000,000	26.00	66,976,000	312	100,000,000	312.00	70,824,000	100.00	70.82	338.00	137,800,000	21.7	24.2		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa dan Alat Kebersihan (Persen)	60	65,000,000	12.00	7,379,500	12	11,000,000	12.00	8,550,000	100.00	77.73	24.00	15,929,500	40.0	24.5		
				Pernyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media Penyedia Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (Media)	300	70,000,000	5.00	7,500,000	60	12,000,000	60.00	7,500,000	100.00	62.50	65.00	15,000,000	21.7	21.4		
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi/konsultasi yang diikuti (kegiatan)	250	1,490,000,000	50.00	269,416,000	50	300,000,000	50.00	272,027,000	100.00	90.68	100.00	541,443,000	40.0	36.3		
				Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Paket)	240	1,000,000,000	4.00	154,695,500	48	170,000,000	48.00	151,355,000	100.00	89.03	52.00	306,050,500	21.7	30.6		
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	141.55			28.8	34.4		
Predikat Kinerja														SANGAT TINGGI	FALSE			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
2				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	100	4,264,500,000	59.00	246,369,000	-	1,852,000,000	34.00	301,551,000	-	16.28	93.00	547,920,000	93.0	12.8	DINAS SOSIAL	
				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terbangun	2	2,050,000,000	-	-	1	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	15	487,000,000	2.00	49,700,000	2	66,000,000	1.00	38,000,000	50.00	57.58	3.00	87,700,000	20.0	18.0		





3				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Persen)	100	250,000,000	3.00	4,200,000	-	45,000,000	-	-	-	-	3.00	4,200,000	3.0	1.7	DINAS SOSIAL	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal (Orang)	10	250,000,000	3.00	4,200,000	2	45,000,000	-	-	-	-	3.00	4,200,000	30.0	1.7		
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			30.00	1.68		
Predikat Kinerja														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
3				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Cakupan Realisasi laporan capaian kinerja dan keuangan (Persen)	100	410,000,000	8.00	33,714,000	-	50,000,000	4.00	7,055,000	-	14.11	12.00	40,769,000	12.0	9.9	DINAS SOSIAL	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersusun (Dokumen)	40	410,000,000	8.00	33,714,000	8	50,000,000	4.00	7,055,000	50.00	14.11	12.00	40,769,000	30.0	9.9		
Rata-rata capaian kinerja (%)														50.00	14.11			30.00	9.94		
Predikat Kinerja														SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
3				Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (Persen)	100	555,000,000	7.00	46,130,000	-	75,000,000	2.00	13,803,800	-	18.41	9.00	59,933,800	9.0	10.8	DINAS SOSIAL	
				Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersusun (Dokumen)	27	555,000,000	7.00	46,130,000	5	75,000,000	2.00	13,803,800	40.00	18.41	9.00	59,933,800	33.3	10.8		
Rata-rata capaian kinerja (%)														40.00	18.41			33.33	10.80		

				Predikat Kinerja		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH									
4				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (Persen)	99.50	4,470,000,000	93.00	425,000,000	-	1,045,000,000	44.00	364,028,000	-	34.84	137.00	789,028,000	137.7	17.7	DINAS SOSIAL
				Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Petugas dan Pendamping Sosial yang terlatih dan mampu melaksanakan tugasnya (Orang)	50	87,000,000	-	-	15	25,000,000	15.00	37,461,600	100.00	149.85	15.00	37,461,600	30.0	43.1	
				Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin (KM) yang terlatih yang mampu menjalankan dan meningkatkan usahanya (Kelompok)	16	600,000,000	-	-	3	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin (KM) yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan di Kabupaten Bone (Kelompok)	43	410,000,000	5.00	60,000,000	9	85,000,000	-	15,205,000	-	17.89	5.00	75,205,000	11.6	18.3	

				Pelatihan Keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang mempunyai keterampilan kerja (Orang)	150	275,000,000			30	50,000,000	-								
				Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan program Keluarga Harapan (Kecamatan)	60	1,105,000,000	27.00	80,000,000	12	200,000,000	12.00	36,654,800	100.00	18.33	39.00	116,654,800	65.0	10.6	
				Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang diberikan bantuan paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam cakupan kecamatan (Kelompok)	26	320,000,000	4.00	50,000,000	5	60,000,000	-	14,950,000	-	24.92	4.00	64,950,000	15.4	20.3	
				Pendataan/Pe mutakhiran Data Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Kecamatan yang menjadi lokus pendataan PMKS dan PSKS (Kecamatan)	60	850,000,000	27.00	65,000,000	12	250,000,000	-	-	-	-	27.00	65,000,000	45.0	7.6	
				Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang mendapatkan bimbingan dan bantuan kesejahteraan sosial (Kelompok)	28	330,000,000	-	60,000,000	5	60,000,000	20.00	218,561,600	400.00	364.27	20.00	278,561,600	71.4	84.4	

				Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil Lainnya	Jumlah Kelompok masyarakat KAT dan Masyarakat terpencil yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (Kelompok)	15	405,000,000	3.00	40,000,000	3	60,000,000	-	7,995,000	-	13.33	3.00	47,995,000	20.0	11.9		
				Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Kelompok Keluarga Miskin (KM) yang mendapatkan pembekalan tentang keterampilan berusaha (Kelompok)	14	335,000,000	-	-	2	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan	Jumlah Koordinasi Kecamatan yang menjadi lokus pelayanan bantuan stimulan (Kegiatan)	60	440,000,000	27.00	70,000,000	12	70,000,000	12.00	33,200,000	100.00	47.43	39.00	103,200,000	65.0	23.5		
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00	47.43			65.00	23.45		
Predikat Kinerja														SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
5				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (Persen)	100	4,003,259,000	77.00	245,349,500	0	1,120,000,000	98.00	1,200,680,800	-	107.20	175.00	1,446,030,300	175.0	36.1	DINAS SOSIAL	
				Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah sarana dan prasarana publik untuk PMKS khususnya bagi Paca dan Lansia yang responsif gender (Paket)	1	250,000,000	-	-	1	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		







					Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah Pelayanan Sarana dan Prasarana serta Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial (Kegiatan)	60	350,000,000	12.00	47,000,000	12	60,000,000	12.00	34,900,000	100.00	58.17	24.00	81,900,000	40.0	23.4		
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah Pelayanan Sarana dan Prasarana serta Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam (Kegiatan)	60	410,000,000	12.00	50,000,000	12	60,000,000	12.00	45,200,000	100.00	75.33	24.00	95,200,000	40.0	23.2		
					Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Jumlah Korban Tindak kekerasan dan Pekerja Migran yang memperoleh perlindungan sosial (Orang)	20	200,000,000	-	-	5	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Jumlah Lanjut Usia yang terlayani dan memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Orang)	45	515,000,000	5.00	60,000,000	7	90,000,000	-	9,500,000	-	10.56	5.00	69,500,000	11.1	13.5		
Rata-rata capaian kinerja (%)															100.00	110.32			103.33	29.65		
Predikat Kinerja															SANGAT TINGGI	FALSE			FALSE	SANGAT RENDAH		
6					Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (Persen)	100	477,000,000	-	60,000,000	25	204,000,000	-	15,450,000	-	7.57	-	75,450,000	-	15.8	DINAS SOSIAL	



7					Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Disabilitas Fisik dan Mental potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan (Persen)	98.10	475,000,000	-	59,850,000	0	241,500,000	-	11,200,000	-	4.64	-	71,050,000	-	15.0	DINAS SOSIAL		
					Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data untuk Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Kegiatan)	2	130,000,000	-	-	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah Gedung Perawatan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang dibangun (Unit)	1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah Penyandang Cacat/Disabilitas dan Eks Trauma yang dididik dan dilatih (Orang)	58	225,000,000	-	-	13	55,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Pendayagunaan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan paket bantuan pemberdayaan (Orang)	51	475,000,000	5.00	59,850,000	9	86,000,000	-	11,200,000	-	13.02	5.00	71,050,000	9.8	15.0			
					Peningkatan Keterampilan Tenaga Pendidik dan Pelatih	Jumlah Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik (pelatih) Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Kegiatan)	4	200,000,000	-	-	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	13.02			9.80	14.96		
Predikat Kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		



8					Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani (Persen)	25.15	450,000,000	-	75,000,000	0	166,000,000	-	21,475,000	-	12.94	-	96,475,000	-	21.4	DINAS SOSIAL	
					Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (Orang)	150	310,000,000	20.00	40,000,000	25	55,000,000	-	21,475,000	-	39.05	20.00	61,475,000	13.3	19.8		
					Pemberdayaan Penyandang Eks Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Tuna Sosial yang memperoleh Pembinaan dan Pemberdayaan (Orang)	44	450,000,000	5.00	35,000,000	8	86,000,000	-	-	-	-	5.00	35,000,000	11.4	7.8		
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) (Kegiatan)	4	100,000,000	-	-	1	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			11.36	7.78		
Predikat Kinerja															SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
9					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan Sarana	9.09	280,000,000	-	77,520,900	0	690,000,000	-	42,394,000	-	6.14	-	119,914,900	-	42.8	DINAS SOSIAL	



					Pemberdayaan Panti Sosial	Jumlah Panti Sosial yang mendapatkan Program Pemberdayaan Panti Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (Panti)	7	280,000,000	1.00	40,000,000	1	40,000,000	-	11,275,000	-	28.19	1.00	51,275,000	14.3	18.3			
					Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial	Jumlah pelaksanaan Kegiatan peningkatan kemampuan pendamping dan petugas sosial (Kegiatan)	4	600,000,000	-	-	1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	28.19			14.29	18.31		
Predikat Kinerja																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
8					Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani (Unit)	1	290,000,000	1.00	60,830,000	1	185,000,000	1.00	79,600,000	100.00	43.03	2.00	140,430,000	200.0	48.4	DINAS SOSIAL		
					Revitalisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana areal Taman Makan Pahlawan (Kegiatan)	5	290,000,000	1.00	60,830,000	1	65,000,000	1.00	79,600,000	100.00	122.46	2.00	140,430,000	40.0	48.4			
					Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah kegiatan partisipasi Organisasi/Lembaga/Dunia Usaha yang dalam peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (Kegiatan)	4	280,000,000	-	-	1	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-			



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Sejak Tahun 2019 telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja Dinas Sosial Kabupaten Bone) dan telah ditetapkan masing - masing indikator target kinerja yang masing masing terdiri dari

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 2 indikator yakni:
  - 1) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
  - 2) Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah/kota
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 1 indikator umum yakni
  - 1) Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIPserta 2 indikator teknis yakni
  - 1) Persentase PMKS yang Tertangani
  - 2) Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial
- c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri dari 7 indikator meliputi:
  - 1) Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
  - 2) Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat
  - 3) Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya
  - 4) Persentase Disabilitas dan Mental potensial yang telah menerima Bantuan dan Pelayanan

- 5) Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani
- 6) Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial
- 7) Jumlah Areal pemakaman yang di tangani

Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku salah satu instansi yang menjalankan tugas pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, jaminan maupun pemberian bantuan sosial telah melaksanakan program dan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan kesejahteraan sosial.

Adapun rincian perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja dari RPJMD dan Renstra untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 bidang Sosial baik dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tergambar dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 2.2.1.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti}} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	
2.	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah/kota	SPM	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.}}{\text{Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	100,00	

1.	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	IKU	_____ X 100%	B	B	B	BB	B	B	B	BB	
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	IKU	<div> <div>Jumlah PMKS yang terlayani</div> <div>Jumlah PMKS yang ada</div> <div>_____ X 100%</div> </div> <div>Jumlah PSKS yang ada</div>	95,35	96,55	97,32	97,89	98,88	97,89	97,32	97,89	

1.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	IKK	<p>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p><math>\times 100\%</math></p> <p>Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis di luar panti</p>	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	
2.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	IKK	<p>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dalam 1 (satu) tahun</p> <p><math>\times 100\%</math></p> <p>Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun</p>	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dari sekian banyak jenis pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah dibagi habis pada semua Bidang/Seksi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagaimana telah diuraikan pada poin terdahulu diatas, maka yang menjadi isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya penanganan Fakir miskin melalui bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2. Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Belum adanya data base tentang anak terlantar (putus sekolah) dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian anak terlantar dan putus sekolah
4. Belum adanya data base tentang penyandang disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian para penyandang disabilitas
5. Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya prasarana pendukung bagi pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya
6. Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial
7. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Taman Makam Pahlawan (TMP)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4.1.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
DINAS SOSIAL					Rp 11,801,975,346	DINAS SOSIAL				Rp 11,801,975,346	
	Meningkatnya Kinerja dan realisasi anggaran Dinas Sosial		Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB (>70-80)	Rp 5,889,303,569	Meningkatnya Kinerja dan realisasi anggaran Dinas Sosial		Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB (>70-80)	Rp 5,889,303,569	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%	Rp 58,536,700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%	Rp 58,536,700	
			Cakupan realisasi Penunjang Pemerintahan Umum ( % )	100%				Cakupan realisasi Penunjang Pemerintahan Umum ( % )	100%		

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial yang tersusun</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>Rp 58,536,700</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial yang tersusun</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>Rp 58,536,700</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Sosial yang tersusun	5 Dokumen	Rp 20,198,350	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Sosial yang tersusun	5 Dokumen	Rp 20,198,350	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 7,881,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 7,881,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 4,495,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 4,495,500	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 7,881,500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 7,881,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 7,881,500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	1 Dokumen	Rp 7,881,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial yang tersusun	5 Dokumen	Rp 10,198,350	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial yang tersusun	5 Dokumen	Rp 10,198,350	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 4,167,422,119</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 4,167,422,119</b>	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp 4,167,422,119</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp 4,167,422,119</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	12 Bulan	Rp 4,152,778,163	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	12 Bulan	Rp 4,152,778,163	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan	Rp 7,321,978	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan	Rp 7,321,978	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	12 Bulan	Rp 7,321,978	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	12 Bulan	Rp 7,321,978	



	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 180,315,000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 180,315,000</b>	
	<b>Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp 180,315,000</b>	<b>Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp 180,315,000</b>	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disiapkan	2 Paket	Rp 20,700,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disiapkan	2 Paket	Rp 20,700,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepengawasan	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kepengawasan	2 Paket	Rp 20,700,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepengawasan	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kepengawasan	2 Paket	Rp 20,700,000	

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	2 Orang	Rp 69,457,500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	2 Orang	Rp 69,457,500	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Paket	Rp 69,457,500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Paket	Rp 69,457,500	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 483,874,150</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 483,874,150</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp 483,874,150</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp 483,874,150</b>	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp	9,008,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp	9,008,500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp	9,008,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp	9,008,500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp	9,008,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp	9,008,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp	140,956,650	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp	140,956,650	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 24,920,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 24,920,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 9,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 9,600,000	
	Penyediaan Bahan Material	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Material bagi kebutuhan kantor sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 9,600,000	Penyediaan Bahan Material	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Penyediaan Material bagi kebutuhan kantor sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 9,600,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah paket keikutsertaan Aparat Dinas Sosial dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Paket	Rp 271,772,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah paket keikutsertaan Aparat Dinas Sosial dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Paket	Rp 271,772,000	

	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( % )</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 373,100,000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( % )</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 373,100,000</b>	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp 373,100,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp 373,100,000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai rencana kebutuhan	3 Unit	Rp 75,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai rencana kebutuhan	3 Unit	Rp 75,000,000	
	Pengadaan Mebel	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	2 Set	Rp 25,200,000	Pengadaan Mebel	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	2 Set	Rp 25,200,000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	7 Set	Rp 112,900,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	7 Set	Rp 112,900,000	
	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya sesuai rencana kebutuhan	2 Set	Rp 40,000,000	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya sesuai rencana kebutuhan	2 Set	Rp 40,000,000	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud sesuai rencana kebutuhan	1 Set	Rp 40,000,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud sesuai rencana kebutuhan	1 Set	Rp 40,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai Rencana kebutuhan	3 Set	Rp 40,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai Rencana kebutuhan	3 Set	Rp 40,000,000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai Rencana kebutuhan	3 Set	Rp 40,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai Rencana kebutuhan	3 Set	Rp 40,000,000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 299,405,550</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 299,405,550</b>	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp 299,405,550</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp 299,405,550</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Pembayaran Jasa surat menyurat sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 3,771,150	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Pembayaran Jasa surat menyurat sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 3,771,150	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet dan tv) serta rekening air dan listrik yang terbayarkan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 94,034,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet dan tv) serta rekening air dan listrik yang terbayarkan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 94,034,400	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 54,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 54,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Paket	Rp 147,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Paket	Rp 147,600,000	



	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( % )</b>	<b>100%</b>	<b>Rp      326,650,050</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( % )</b>	<b>100%</b>	<b>Rp      326,650,050</b>	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp      326,650,050</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp      326,650,050</b>	
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Paket Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>21 Paket</b>	<b>Rp      156,680,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>Jumlah Paket Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>21 Paket</b>	<b>Rp      156,680,000</b>	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebel secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	21 Paket	Rp 9,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebel secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	21 Paket	Rp 9,600,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 28,102,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 28,102,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	JumlahPaket Pemeliharaan Aset Tetap lainnya secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 9,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	JumlahPaket Pemeliharaan Aset Tetap lainnya secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 9,600,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 66,464,050	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 66,464,050	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 28,102,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 28,102,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 28,102,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 28,102,000	
	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)</b>	<b>50%</b>	<b>Rp 431,613,000</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)</b>	<b>50%</b>	<b>Rp 431,613,000</b>	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)</b>	<b>50%</b>	<b>Rp 431,613,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)</b>	<b>50%</b>	<b>Rp 431,613,000</b>	

	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Persentase permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang direkomendasikan	80%	Rp 71,935,500	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Persentase permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang direkomendasikan	80%	Rp 71,935,500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kabupaten Bone	Jumlah Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang dikoordinasikan	5 Izin	Rp 71,935,500	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kabupaten Bone	Jumlah Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang dikoordinasikan	5 Izin	Rp 71,935,500	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan sosial	50%	Rp 359,677,500	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan sosial	50%	Rp 359,677,500	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Rp 71,935,500	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Rp 71,935,500	

	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan	1 Kegiatan	Rp 71,935,500	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan	1 Kegiatan	Rp 71,935,500	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan	1 Kegiatan	Rp 71,935,500	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan	1 Kegiatan	Rp 71,935,500	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	1 Kegiatan	Rp 71,935,500	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	1 Kegiatan	Rp 71,935,500	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang diberdayakan	1 Kegiatan	Rp 71,935,500	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten Bone	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang diberdayakan	1 Kegiatan	Rp 71,935,500	

	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Warga Negara Korban Konflik Sosial yang tertangani (%)	50%	Rp 246,922,700	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Warga Negara Korban Konflik Sosial yang tertangani (%)	50%	Rp 246,922,700	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kabupaten Bone	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Warga Negara Korban Konflik Sosial yang tertangani (%)	50%	Rp 246,922,700	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kabupaten Bone	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Warga Negara Korban Konflik Sosial yang tertangani (%)	50%	Rp 246,922,700	
	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.	Kabupaten Bone	Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan dan warga negara korban konflik sosial yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal	50%	Rp 246,922,700	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.	Kabupaten Bone	Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan dan warga negara korban konflik sosial yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal	50%	Rp 246,922,700	

	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.	Kabupaten Bone	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dan warga negara korban konflik sosial yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal	135 Orang	Rp 246,922,700	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.	Kabupaten Bone	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dan warga negara korban konflik sosial yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal	135 Orang	Rp 246,922,700	
	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,686,655,642</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,686,655,642</b>	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kabupaten Bone	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,686,655,642</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kabupaten Bone	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,686,655,642</b>	<b>Program untuk pemenuhan Standar Pelayanan</b>

			pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)					pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)			an Minimal (SPM)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Bone	Cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Rp 565,734,642	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Bone	Cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Rp 565,734,642	Kegiatan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	100 Orang	Rp 124,750,000	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	100 Orang	Rp 124,750,000	



	Penyediaan Sandang	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	100 Orang	Rp 90,090,000	Penyediaan Sandang	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	100 Orang	Rp 90,090,000	
	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	55 Orang	Rp 70,000,000	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	55 Orang	Rp 70,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15 Orang	Rp 28,102,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15 Orang	Rp 28,102,000	

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	40 Orang	Rp	56,078,642	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	40 Orang	Rp	56,078,642
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Bone	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1 Kegiatan	Rp	28,102,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Bone	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1 Kegiatan	Rp	28,102,000

	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	15 Orang	Rp 28,102,000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	15 Orang	Rp 28,102,000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	15 Orang	Rp 28,102,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	15 Orang	Rp 28,102,000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Bone	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	5 Layanan	Rp 28,102,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Bone	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	5 Layanan	Rp 28,102,000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Bone	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2 Unit	Rp 28,102,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Bone	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2 Unit	Rp 28,102,000	

	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	15 Orang	Rp 28,102,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	15 Orang	Rp 28,102,000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	15 Orang	Rp 28,102,000	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Bone	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	15 Orang	Rp 28,102,000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	100%	Rp 1,120,921,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	100%	Rp 1,120,921,000	

	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Bone	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	5 Layanan	Rp 189,000,000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Bone	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	5 Layanan	Rp 189,000,000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Bone	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2 Unit	Rp 131,032,500	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Bone	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2 Unit	Rp 131,032,500	
	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	100 Orang	Rp 131,032,500	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	100 Orang	Rp 131,032,500	
	Penyediaan Sandang	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket sandang	100 Orang	Rp 132,650,000	Penyediaan Sandang	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket sandang	100 Orang	Rp 132,650,000	

	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memanfaatkan alat bantu	15 Orang	Rp 90,090,000	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memanfaatkan alat bantu	15 Orang	Rp 90,090,000	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kabupaten Bone	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	15 Paket	Rp 90,090,000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kabupaten Bone	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	15 Paket	Rp 90,090,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan	40 Orang	Rp 55,764,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan	40 Orang	Rp 55,764,000	

			sosial					sosial			
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Bone	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1 Kegiatan	Rp 132,650,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Bone	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1 Kegiatan	Rp 132,650,000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	15 Orang	Rp 28,102,000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	15 Orang	Rp 28,102,000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses layanan	15 Orang	Rp 28,102,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses layanan	15 Orang	Rp 28,102,000	

			pendidikan dan Kesehatan dasar					pendidikan dan Kesehatan dasar			
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	15 Orang	Rp 28,102,000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	15 Orang	Rp 28,102,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direunifikasi dengan keluarga	15 Orang	Rp 28,102,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direunifikasi dengan keluarga	15 Orang	Rp 28,102,000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dirujuk	15 Orang	Rp 28,102,000	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Bone	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dirujuk	15 Orang	Rp 28,102,000	



	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah lembaga yang melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	5 Lembaga	Rp 28,102,000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah lembaga yang melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	5 Lembaga	Rp 28,102,000	
	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)</b>	<b>97,89%</b>	<b>Rp 2,181,961,561</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)</b>	<b>97,89%</b>	<b>Rp 2,181,961,561</b>	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kabupaten Bone	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	97,89%	Rp 2,181,961,561	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kabupaten Bone	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	97,89%	Rp 2,181,961,561	
	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Kabupaten Bone	Cakupan anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Rp 143,925,174	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Kabupaten Bone	Cakupan anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Rp 143,925,174	

	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Bone	Jumlah anak-anak terlantar yang memperoleh kegiatan penjangkauan	15 Orang	Rp 71,962,587	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Bone	Jumlah anak-anak terlantar yang memperoleh kegiatan penjangkauan	15 Orang	Rp 71,962,587	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Bone	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan rujukan	15 Orang	Rp 71,962,587	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Bone	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan rujukan	15 Orang	Rp 71,962,587	
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Bone	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dipelihara yang mendapatkan pemantauan		Rp -	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Bone	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dipelihara yang mendapatkan pemantauan		Rp -	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>Cakupan Fakir miskin yang terdata dan mendapatkan bantuan dan jaminan sosial</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 2,038,036,387</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>Cakupan Fakir miskin yang terdata dan mendapatkan bantuan dan jaminan sosial</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 2,038,036,387</b>	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah fakir miskin yang terdata	75.000 RT	Rp 546,922,700	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah fakir miskin yang terdata	75.000 RT	Rp 546,922,700	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah fakir miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	75.000 RT	Rp 328,639,100	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bone	Jumlah fakir miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	75.000 RT	Rp 328,639,100	
	Fasilitasi Bantuan Sosial	Kabupaten Bone	Jumlah keluarga miskin yang	60.000 KK	Rp 345,256,000	Fasilitasi Bantuan Sosial	Kabupaten Bone	Jumlah keluarga miskin yang	60.000 KK	Rp 345,256,000	

	Kesejahteraan Keluarga		mendapatkan bantuan dan jaminan sosial			Kesejahteraan Keluarga		mendapatkan bantuan dan jaminan sosial			
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Bone	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	12 KUBE	Rp 817,218,587	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Bone	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	12 KUBE	Rp 817,218,587	
	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,202,192,674</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,202,192,674</b>	
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kabupaten Bone	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,202,192,674</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kabupaten Bone	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,202,192,674</b>	<b>Program untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>

	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>Cakupan korban bencana alam dan bencana sosial yang tertangani dan mendapatkan perlindungan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 834,842,674</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>Cakupan korban bencana alam dan bencana sosial yang tertangani dan mendapatkan perlindungan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 834,842,674</b>	<b>Kegiatan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>
	Penyediaan Makanan	Kabupaten Bone	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	500 Orang	Rp 323,567,500	Penyediaan Makanan	Kabupaten Bone	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	500 Orang	Rp 323,567,500	
	Penyediaan Sandang	Kabupaten Bone	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	500 Orang	Rp 242,910,000	Penyediaan Sandang	Kabupaten Bone	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	500 Orang	Rp 242,910,000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupaten Bone	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	25 Unit	Rp 71,962,587	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupaten Bone	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	25 Unit	Rp 71,962,587	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Bone	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	500 Orang	Rp 71,962,587	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Bone	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	500 Orang	Rp 71,962,587	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten Bone	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	500 Orang	Rp 124,440,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten Bone	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	500 Orang	Rp 124,440,000	

	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>Cakupan masyarakat yang diberdayakan terhadap kesiapsiagaan bencana</b>	<b>5%</b>	<b>Rp 367,350,000</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>Cakupan masyarakat yang diberdayakan terhadap kesiapsiagaan bencana</b>	<b>5%</b>	<b>Rp 367,350,000</b>	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Bone	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana yang Dilaksanakan	5 Kali	Rp 124,440,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Bone	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana yang Dilaksanakan	5 Kali	Rp 124,440,000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Bone	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Taruna Siaga Bencana yang Dilaksanakan	5 Kali	Rp 242,910,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Bone	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Taruna Siaga Bencana yang Dilaksanakan	5 Kali	Rp 242,910,000	
	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)</b>	<b>1 Areal</b>	<b>Rp 163,326,200</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)</b>	<b>1 Areal</b>	<b>Rp 163,326,200</b>	
	<b>PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone</b>	<b>Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)</b>	<b>1 Areal</b>	<b>Rp 163,326,200</b>	<b>PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone</b>	<b>Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)</b>	<b>1 Areal</b>	<b>Rp 163,326,200</b>	

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone	Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)	1 Areal	Rp 163,326,200	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone	Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)	1 Areal	Rp 163,326,200	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone	Jumlah Areal Pemakaman yang Dipelihara (Areal)	1 Areal	Rp 81,663,100	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone	Jumlah Areal Pemakaman yang Dipelihara (Areal)	1 Areal	Rp 81,663,100	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone	Jumlah Areal Pemakaman yang dilakukan pengamanan (Areal)	1 Areal	Rp 81,663,100	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone	Jumlah Areal Pemakaman yang dilakukan pengamanan (Areal)	1 Areal	Rp 81,663,100	
					Rp 11,801,975,346					Rp 11,801,975,346	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Bone senantiasa disusun berdasarkan mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada BAB II Bagian Kesatu Pasal 7 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan top down – bottom up.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bone telah melakukan berbagai upaya untuk mensinergikan ke 4 (empat) pendekatan tersebut ke dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan, baik dalam Renstra maupun dalam Rencana Kerja (Renja) serta RKA dan DPA. Sehingga diharapkan dari tahun ke tahun proses penyusunan perencanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan pembangunan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan daerah dan mensinergikan beberapa pendekatan tersebut, sangat dibutuhkan berbagai input untuk dianalisis, diolah, dibahas, serta menjadi bahan perumusan program kegiatan dalam perencanaan tersebut. Semakin lengkap data yang tersedia dan bisa dipergunakan dalam proses penyusunan perencanaan, maka output perencanaan pembangunan tersebut akan bisa lebih baik, berkualitas dan akuntabel.

Salah satu data yang penting sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan adalah usulan dari hasil Musrenbang termasuk dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Musrenbangdes, Musrenbang RKPD Kecamatan, Forum PD/Forum Gabungan PD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten, termasuk hasil Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Bone dan usulan masyarakat lainnya yang telah diintegrasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kabupaten Bone.

Usulan yang masuk menjadi bagian dari 5 usulan prioritas setiap desa yang ditujukan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Bone termasuk Dinas Sosial. Kemudian usulan yang telah diproses akan dirangking lagi berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tersedia. Adapun mekanisme yang ditempuh untuk memilih usulan yang adal adalah dengan melakukan beberapa mekanisme yakni:

1. Melakukan pengecekan data masyarakat miskin melalui Basis Data Terpadu (BDT) pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) kami rekapitulasi berdasarkan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan.
2. Melakukan Survei awal pada lokasi usulan atau calon penerima manfaat baik berupa jaminan sosial, bantuan sosial, Usaha Ekonomis Produktif (UEF) maupun jenis bantuan lainnya.
3. Meminta dukungan data melalui pengajuan Proposal terkait gambaran profil penerima manfaat dan jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan calon penerima manfaat.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja yang diintegrasikan dengan sistem perencanaan yang lain untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2022 yang utuh. Adapun usulan masyarakat yang masuk yang telah disinkronkan dengan jenis kegiatan yang sesuai usulan tersebut tergambar dalam tabel berikut:



**Tabel 2.5.1.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b> <b>Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin</b> <b>Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> <i>Sub Kegiatan: Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</i>		<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani (Persen)</b>		
		Dusun Tanètè Desa Tèamusu Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan (Alat Penjahitan)	3 Paket	
		Desa Galung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	3 Paket	
		Desa Sanrangeng Kecamatan Dua Boccoè Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	3 Paket	
		Desa Pattiro Kecamatan Dua Boccoè Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan (Alat Penjahitan)	1 Kelompok	
		Desa Samaènèrè Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	1 Paket	
		Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)	1 Paket	

Awangponè Kabupaten Bonè	Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan (Alat Penjahitan)			
Desa Ammessangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	3	Paket	
Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	1	Paket	
Kelurahan Pompanua Kecamatan Ajangale Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	1	Paket	
Desa Angkuè Kecamatan Kajuara Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pesisir	1	Paket	
Kelurahan Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	1	Paket	
Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	1	Paket	
Desa Watangta Kecamatan Cenrana Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	5	Kelompok	
Desa Amali Riattang Kecamatan Amali Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	1	Paket	
Desa Latonro Kecamatan Cènrana Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pesisir	2	Paket	
Desa Waètuo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin	1	Paket	

			Pedesaan		
		Desa Pasèmpe Kecamatan Palakka Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan (Alat Pertukangan)	1 Paket	
		Desa Lèmo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	1 Paket	
		Kelurahan Polèwali Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Perkotaan	6 Paket	
		Desa Watang Padacenga Kecamatan Dua Boccoè Kabupaten Bonè	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin Pedesaan	5 Paket	

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial tahun 2013-2018, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sosial atau masyarakat, pada dasarnya merupakan tujuan dan orientasi utama pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang tidak hanya diukur berdasarkan parameter sektoral semata, melainkan pada akhirnya akan diukur berdasarkan dampak atau pengaruhnya terhadap upaya mendorong peningkatan kesejahteraan sosial/masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan yang erat antar berbagai bidang pembangunan yang ujungnya akan bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembangunan dibidang sosial adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.

Dari Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Propinsi, permasalahan eksternal yang sedang dan kemungkinan masih akan dihadapi dalam jangka waktu 2019-2023 mendatang dapat dilihat kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia dari besarnya Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada sisi lain permasalahan tingginya angka putus sekolah, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat digambarkan faktor yang menjadi Penghambat maupun Pendorong dalam pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Daerah adalah sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat

- ) Periode Waktu Pelaksanaan RENSTRA K/L dan RENSTRA SKPD yang tidak beriring, sehingga dalam perencanaan sering kali dijumpai perbedaan
- ) Penentuan Indikator PMKS yang terkadang menimbulkan perbedaan dalam menetapkan sasaran
- ) Dinas Sosial Kabupaten Bone kurang dilibatkan dalam Penyusunan RENSTRA K/L
- ) Besarnya Jumlah Populasi PMKS di Kabupaten Bone.
- ) Adanya Inkonsistensi Dukungan Pendanaan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan di RENSTRA K/L terutama untuk pemenuhan anggaran pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

b. Faktor Pendorong

- ) Ketersediaan alokasi anggaran yang cukup besar untuk mendanai Program Nasional yang dilaksanakan di daerah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial lainnya

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone, maka Dinas Sosial Kabupaten Bone selaku salah satu Perangkat Daerah melakukan penyelarasan secara teknis untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone tersebut dengan menetapkan perubahan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, adapun perubahan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tujuan :**

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial**

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Dinas Sosial Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

**Sasaran :**

- 1. Meningkatnya Kinerja dan realisasi anggaran Dinas Sosial**
- 2. Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).**

Jika digambarkan dalam bentuk tabel, maka akan tergambar perbandingan tentang tujuan dan sasaran serta indikator masing – masing disertai target yang akan dicapai mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima atau dengan kata lain, mulai dari Renstra tahun 2018 – 2023 maupun Perubahan Renstra tahun 2018 - 2023 pada kedua tabel berikut.

**Tabel 3.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial		Nilai SAKIP Dinas Sosial	<b>B</b>	<b>BB</b>	A
		Meningkatnya Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	<b>92 %</b>	<b>95 %</b>	98 %
		Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PMKS yang Tertangani	<b>97,32</b>	<b>97,89</b>	98,50

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan Program dan Kegiatan senantiasa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur tentang nomor akun (rekening), item – item nama program serta nama-nama kegiatan serta sub kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar sistem perencanaan yang dilakukan tetap tersistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun Program dan Kegiatan yang ada terbagi atas 2 yakni yang sifatnya rutin dan sifatnya non rutin (teknis). Adapun Program dan Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Program dan Kegiatan Rutin
- 2. Program dan Kegiatan Non Rutin (Teknis)

Tabel 6.1  
Nomor Akun,Nama Program dan Kegiatan Tahun 2021– 2023

Kode Rekening	Uraian
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Kode Rekening	Uraian
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.06.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
1.06.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud
1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
1.06.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01.2.09 .05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mebel
1.06.01.2.09 .06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.06.01.2.09 .07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
1.06.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.01.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
<b>1.06.02.2.02</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
<b>1.06.03</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>
<b>1.06.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.</b>
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan

Kode Rekening	Uraian
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan
<b>1.06.04.2.02</b>	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan
1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
<b>1.06.05</b>	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
<b>1.06.05.1.01</b>	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.1.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.1.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.1.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
<b>1.06.04.2.02</b>	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.1.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1.06.05.1.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
<b>1.06.06</b>	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
<b>1.06.06.2.01</b>	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial

Kode Rekening	Uraian
<b>1.06.06.2.02</b>	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
<b>1.06.07</b>	PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
<b>1.06.07.2.01</b>	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- a. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan, khususnya yang terkait dengan kegiatan dan sub kegiatan teknis yang disusun adalah sebagai berikut:

- 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Khusus bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone jika dikaitkan dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Dinas Sosial harus menjalankan visi terkait dengan visi **Mandiri** yang mengandung makna kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan dan **Sejahtera** yang mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini juga sesuai yang tertuang dalam Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya Misi yang ke-2 (kedua) yakni

***“Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.”*** dan Misi yang ke-3 (ketiga yakni ***“Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.”*** Dengan tujuan *“meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan”* serta sasaran *“menurunnya angka kemiskinan”*.

Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga tidak terlepas dari visi kedua yakni visi **berdaya saing**.

2) Pencapaian SDGs dan Pengentasan kemiskinan

Untuk pencapaian SDGs dan Pengentasan kemiskinan ini beririsan dengan visi dan misi RPJMD terkait dengan penurunan angka kemiskinan didukung oleh 3 program yakni Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi serta Program Penanganan Bencana yang terkait dengan kegiatan pemenuhan penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

3) Pencapaian NSPK dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Untuk pencapaian SPM ini didukung oleh 2 program yakni Program Rehabilitasi Sosial yang terkait dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti serta Program Penanganan Bencana yang terkait dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana social selama masa tanggap darurat.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

- 1) Jumlah program terdiri dari 7 program dan 17 kegiatan yang tersebar dalam beberapa sub kegiatan.
- 2) Program dan kegiatan tersebar ke berbagai sub kegiatan yang berfokus pada penanganan kemiskinan termasuk dalam hal Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat adanya Pandemi Covid-19 yang diperuntukkan baik masyarakat miskin pedesaan, perkotaan maupun pesisir di wilayah

Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 kecamatan serta 372 desa dan kelurahan.

- 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2022 mencapai **Rp. 11.801.975.346,-** yang diharapkan bisa ditalangi melalui DAU bagi APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022. Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bone akibat adanya *refocusing* anggaran, maka tetap diharapkan ada kucuran bantuan Pemerintah Pusat melalui APBN, kemudian APBD Provinsi Sulawesi Selatan serta dana lainnya termasuk *Coorporate Social Responsibility (CSR)* dari Dunia Usaha yang ada.
- c. Rumusan program dan kegiatan yang ada telah sesuai dengan rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada uraian Tabel T-C.33 sebagai berikut:

**Tabel T-C. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan**

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1.06	DINAS SOSIAL				Rp 11,801,975,346				Rp 13,097,503,298
SASARAN 1	Meningkatnya Kinerja dan realisasi anggaran Dinas Sosial	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP		BB (>70-80)	Rp 5,889,303,569			BB(>70-80)	Rp 6,125,127,363
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan ( % )	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	100%	Rp 58,536,700	APBD Kabupaten Bone		100%	Rp 58,536,700
		Cakupan realisasi Penunjang Pemerintahan Umum ( % )		100%				100%	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial yang tersusun	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	14 Dokumen	Rp 58,536,700	APBD Kabupaten Bone		14 Dokumen	Rp 58,536,700
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Sosial yang tersusun	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	5 Dokumen	Rp 20,198,350	APBD Kabupaten Bone		5 Dokumen	Rp 20,198,350
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	1 Dokumen	Rp 7,881,500	APBD Kabupaten Bone		1 Dokumen	Rp 7,881,500
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	1 Dokumen	Rp 4,495,500	APBD Kabupaten Bone		1 Dokumen	Rp 4,495,500
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	1 Dokumen	Rp 7,881,500	APBD Kabupaten Bone		1 Dokumen	Rp 7,881,500

1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dinas Sosial yang tersusun	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	1 Dokumen	Rp	7,881,500	APBD Kabupaten Bone		1 Dokumen	Rp	7,881,500
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial yang tersusun	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	5 Dokumen	Rp	10,198,350	APBD Kabupaten Bone		5 Dokumen	Rp	10,198,350
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)</b>	<b>Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>4,167,422,119</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>4,371,300,163</b>
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp</b>	<b>4,167,422,119</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp</b>	<b>4,371,300,163</b>
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Bulan	Rp	4,152,778,163	APBD Kabupaten Bone		12 Bulan	Rp	4,352,778,163
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Bulan	Rp	7,321,978	APBD Kabupaten Bone		12 Bulan	Rp	9,261,000
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Bulan	Rp	7,321,978	APBD Kabupaten Bone		12 Bulan	Rp	9,261,000
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur ( % )</b>	<b>Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>180,315,000</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>187,260,750</b>
<b>1.06.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè</b>	<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp</b>	<b>180,315,000</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>4 Laporan (Triwulan)</b>	<b>Rp</b>	<b>187,260,750</b>
1.06.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disiapkan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	2 Paket	Rp	20,700,000	APBD Kabupaten Bone		2 Paket	Rp	20,700,000
1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan koordinasi dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	2 Paket	Rp	20,700,000	APBD Kabupaten Bone		2 Paket	Rp	20,700,000
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	2 Orang	Rp	69,457,500	APBD Kabupaten Bone		2 Orang	Rp	72,930,375
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	2 Paket	Rp	69,457,500	APBD Kabupaten Bone		2 Paket	Rp	72,930,375

1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	100%	Rp	483,874,150	APBD Kabupaten Bone		100%	Rp	523,874,150
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	4 Laporan (Triwulan)	Rp	483,874,150	APBD Kabupaten Bone		4 Laporan (Triwulan)	Rp	523,874,150
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	9,008,500	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	9,008,500
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	9,008,500	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	9,008,500
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	9,008,500	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	9,008,500
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	140,956,650	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	140,956,650
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	24,920,000	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	24,920,000
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	9,600,000	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	9,600,000
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Penyediaan Material bagi kebutuhan kantor sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	9,600,000	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	9,600,000
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket keikutsertaan Aparat Dinas Sosial dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	271,772,000	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	311,772,000



1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( % )	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	100%	Rp	373,100,000	APBD Kabupaten Bone		100%	Rp	358,100,000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	4 Laporan (Triwulan)	Rp	373,100,000	APBD Kabupaten Bone		4 Laporan (Triwulan)	Rp	358,100,000
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	3 Unit	Rp	75,000,000	APBD Kabupaten Bone		3 Unit	Rp	100,000,000
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleu Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	2 Set	Rp	25,200,000	APBD Kabupaten Bone		2 Set	Rp	25,200,000
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	7 Set	Rp	112,900,000	APBD Kabupaten Bone		7 Set	Rp	112,900,000
1.06.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	2 Set	Rp	40,000,000	APBD Kabupaten Bone		2 Set	Rp	40,000,000
1.06.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	1 Set	Rp	40,000,000	APBD Kabupaten Bone			Rp	-
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai Rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	3 Set	Rp	40,000,000	APBD Kabupaten Bone		3 Set	Rp	40,000,000
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai Rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	3 Set	Rp	40,000,000	APBD Kabupaten Bone		3 Set	Rp	40,000,000

1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	100%	Rp	299,405,550	APBD Kabupaten Bone		100%	Rp	299,405,550
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	4 Laporan (Triwulan)	Rp	299,405,550	APBD Kabupaten Bone		4 Laporan (Triwulan)	Rp	299,405,550
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Pembayaran Jasa surat menyurat sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	3,771,150	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	3,771,150
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet dan tv) serta rekening air dan listrik yang terbayarkan sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	94,034,400	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	94,034,400
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	54,000,000	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	54,000,000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	12 Paket	Rp	147,600,000	APBD Kabupaten Bone		12 Paket	Rp	147,600,000
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( % )	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	100%	Rp	326,650,050	APBD Kabupaten Bone		100%	Rp	326,650,050
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	4 Laporan (Triwulan)	Rp	326,650,050	APBD Kabupaten Bone		4 Laporan (Triwulan)	Rp	326,650,050
1.06.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	21 Paket	Rp	156,680,000	APBD Kabupaten Bone		22 paket	Rp	156,680,000
1.06.01.2.09 .05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebel secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	21 Paket	Rp	9,600,000	APBD Kabupaten Bone		22 paket	Rp	9,600,000
1.06.01.2.09 .06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	1 Paket	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone		1 Paket	Rp	28,102,000

1.06.01.2.09.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Aset Tetap lainnya secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	1 Paket	Rp	9,600,000	APBD Kabupaten Bone		1 Paket	Rp	9,600,000
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	1 Paket	Rp	66,464,050	APBD Kabupaten Bone		1 Paket	Rp	66,464,050
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	1 Paket	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone		1 Paket	Rp	28,102,000
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bonè	1 Paket	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone		1 Paket	Rp	28,102,000
<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)</b>		<b>50%</b>	<b>Rp</b>	<b>431,613,000</b>			<b>70%</b>	<b>Rp</b>	<b>431,613,000</b>
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>50%</b>	<b>Rp</b>	<b>431,613,000</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>70%</b>	<b>Rp</b>	<b>431,613,000</b>
<b>1.06.02.2.02</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang direkomendasikan</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>80%</b>	<b>Rp</b>	<b>71,935,500</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>90%</b>	<b>Rp</b>	<b>71,935,500</b>
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin Undian Gratis Berhadiah dan Izin Pengumpulan Uang atau Barang yang dikoordinasikan	Kabupaten Bone	5 Izin	Rp	71,935,500	APBD Kabupaten Bone		5 Izin	Rp	71,935,500
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan sosial</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>50%</b>	<b>Rp</b>	<b>359,677,500</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>70%</b>	<b>Rp</b>	<b>359,677,500</b>
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat yang dilaksanakan	Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	APBD Kabupaten Bone		1 Kegiatan	Rp	71,935,500
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan	Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	APBD Kabupaten Bone		1 Kegiatan	Rp	71,935,500

1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang diberdayakan	Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	APBD Kabupaten Bone		1 Kegiatan	Rp	71,935,500
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang diberdayakan	Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	APBD Kabupaten Bone		1 Kegiatan	Rp	71,935,500
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang diberdayakan	Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp	71,935,500	APBD Kabupaten Bone		1 Kegiatan	Rp	71,935,500
<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Warga Negara Korban Konflik Sosial yang tertangani (%)</b>		<b>50%</b>	<b>Rp</b>	<b>246,922,700</b>			<b>75%</b>	<b>Rp</b>	<b>246,922,700</b>
<b>1.06.03</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Warga Negara Korban Konflik Sosial yang tertangani (%)</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>50%</b>	<b>Rp</b>	<b>246,922,700</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>75%</b>	<b>Rp</b>	<b>246,922,700</b>
<b>1.06.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.</b>	<b>Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan dan warga negara korban konflik sosial yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>50%</b>	<b>Rp</b>	<b>246,922,700</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>75%</b>	<b>Rp</b>	<b>246,922,700</b>
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa atau Kelurahan Asal.	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dan warga negara korban konflik sosial yang mendapatkan fasilitasi pemulangan ke daerah asal	Kabupaten Bone	135 Orang	Rp	246,922,700	APBD Kabupaten Bone		140 Orang	Rp	246,922,700

<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 1,686,655,642</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1,730,027,000</b>
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,686,655,642</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>	<b>Program untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,730,027,000</b>
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 565,734,642</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>	<b>Kegiatan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 579,656,000</b>
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Kabupaten Bone	100 Orang	Rp 124,750,000	APBD Kabupaten Bone		100 Orang	Rp 124,750,000
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Kabupaten Bone	100 Orang	Rp 90,090,000	APBD Kabupaten Bone		100 Orang	Rp 90,090,000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Kabupaten Bone	55 Orang	Rp 70,000,000	APBD Kabupaten Bone		55 Orang	Rp 70,000,000
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp 28,102,000	APBD Kabupaten Bone		15 Orang	Rp 28,102,000

1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Kabupaten Bone	40 Orang	Rp	56,078,642	APBD Kabupaten Bone	40 Orang	Rp	70,000,000
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp	28,102,000
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Kabupaten Bone	5 Layanan	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	5 Layanan	Rp	28,102,000
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Kabupaten Bone	2 Unit	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	2 Unit	Rp	28,102,000
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000

1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kabupaten Bone	100%	Rp	1,120,921,000	APBD Kabupaten Bone	100%	Rp	1,150,371,000
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Kabupaten Bone	5 Layanan	Rp	189,000,000	APBD Kabupaten Bone	5 Layanan	Rp	198,450,000
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Kabupaten Bone	2 Unit	Rp	131,032,500	APBD Kabupaten Bone	2 Unit	Rp	131,032,500
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Kabupaten Bone	100 Orang	Rp	131,032,500	APBD Kabupaten Bone	100 Orang	Rp	131,032,500
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket sandang	Kabupaten Bone	100 Orang	Rp	132,650,000	APBD Kabupaten Bone	100 Orang	Rp	132,650,000
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memanfaatkan alat bantu	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	90,090,000	APBD Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	90,090,000
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Kabupaten Bone	15 Paket	Rp	90,090,000	APBD Kabupaten Bone	15 Paket	Rp	90,090,000
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Kabupaten Bone	40 Orang	Rp	55,764,000	APBD Kabupaten Bone	40 Orang	Rp	75,764,000

1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp	132,650,000	APBD Kabupaten Bone	1 Kegiatan	Rp	132,650,000
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direunifikasi dengan keluarga	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dirujuk	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	15 Orang	Rp	28,102,000
1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	Kabupaten Bone	5 Lembaga	Rp	28,102,000	APBD Kabupaten Bone	5 Lembaga	Rp	28,102,000



<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)</b>		<b>97,89%</b>	<b>Rp 2,181,961,561</b>			<b>98,50%</b>	<b>Rp 3,181,961,561</b>
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>97,89%</b>	<b>Rp 2,181,961,561</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>98,50%</b>	<b>Rp 3,181,961,561</b>
<b>1.06.05.1.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Cakupan anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 143,925,174</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 215,887,761</b>
1.06.05.1.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang memperoleh kegiatan penjangkauan	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp 71,962,587	APBD Kabupaten Bone		15 Orang	Rp 71,962,587
1.06.05.1.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan rujukan	Kabupaten Bone	15 Orang	Rp 71,962,587	APBD Kabupaten Bone		15 Orang	Rp 71,962,587
1.06.05.1.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang dipelihara yang mendapatkan pemantauan	Kabupaten Bone		Rp -	APBD Kabupaten Bone		15 Orang	Rp 71,962,587
<b>1.06.05.1.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Fakir miskin yang terdata dan mendapatkan bantuan dan jaminan sosial</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>85%</b>	<b>Rp 2,038,036,387</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>		<b>90%</b>	<b>Rp 2,966,073,800</b>
1.06.05.1.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Kabupaten Bone	75.000 RT	Rp 546,922,700	APBD Kabupaten Bone		70.000 RT	Rp 946,922,700
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	Kabupaten Bone	75.000 RT	Rp 328,639,100	APBD Kabupaten Bone		70.000 RT	Rp 528,639,100
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan dan jaminan sosial	Kabupaten Bone	60.000 KK	Rp 345,256,000	APBD Kabupaten Bone		54.543 KK	Rp 545,256,000
1.06.05.1.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	Kabupaten Bone	12 KUBE	Rp 817,218,587	APBD Kabupaten Bone		15 KUBE	Rp 945,256,000

<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 1,202,192,674</b>			<b>100%</b>	<b>Rp 1,202,192,674</b>
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,202,192,674</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>	<b>Program untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 1,202,192,674</b>
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan korban bencana alam dan bencana sosial yang tertangani dan mendapatkan perlindungan sosial</b>	<b>Kabupaten Bone</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 834,842,674</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>	<b>Kegiatan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 834,842,674</b>
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Kabupaten Bone	500 Orang	Rp 323,567,500	APBD Kabupaten Bone		500 Orang	Rp 323,567,500
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Kabupaten Bone	500 Orang	Rp 242,910,000	APBD Kabupaten Bone		500 Orang	Rp 242,910,000
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Kabupaten Bone	25 Unit	Rp 71,962,587	APBD Kabupaten Bone		25 Unit	Rp 71,962,587
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Kabupaten Bone	500 Orang	Rp 71,962,587	APBD Kabupaten Bone		500 Orang	Rp 71,962,587
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Kabupaten Bone	500 Orang	Rp 124,440,000	APBD Kabupaten Bone		500 Orang	Rp 124,440,000

1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan masyarakat yang diberdayakan terhadap kesiapsiagaan bencana	Kabupaten Bone	5%	Rp	367,350,000	APBD Kabupaten Bone		7%	Rp	367,350,000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana yang Dilaksanakan	Kabupaten Bone	5 Kali	Rp	124,440,000	APBD Kabupaten Bone		5 Kali	Rp	124,440,000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Taruna Siaga Bencana yang Dilaksanakan	Kabupaten Bone	5 Kali	Rp	242,910,000	APBD Kabupaten Bone		5 Kali	Rp	242,910,000
<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)</b>		<b>1 Areal</b>	<b>Rp</b>	<b>163,326,200</b>			<b>1 Areal</b>	<b>Rp</b>	<b>179,659,000</b>
<b>1.06.07</b>	<b>PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)</b>	<b>Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone</b>	<b>1 Areal</b>	<b>Rp</b>	<b>163,326,200</b>	<b>APBD Kabupaten Bone</b>	<b>1 Areal</b>		<b>Rp</b>	<b>179,859,000</b>
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Areal Pemakaman yang Ditangani (Areal)	Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone	1 Areal	Rp	163,326,200	APBD Kabupaten Bone		1 Areal	Rp	179,859,000
1.06.07.2.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Areal Pemakaman yang Dipelihara (Areal)	Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone	1 Areal	Rp	81,663,100	APBD Kabupaten Bone		1 Areal	Rp	89,929,500
1.06.07.2.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Areal Pemakaman yang dilakukan pengamanan (Areal)	Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watamponè Kabupaten Bone	1 Areal	Rp	81,663,100	APBD Kabupaten Bone		1 Areal	Rp	89,929,500
					<b>Rp.</b>	<b>11,801,975,346</b>				<b>Rp.</b>	<b>13,097,503,298</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan sasaran merupakan objek yang akan menjadi fokus dalam penerapan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Jika kedua hal ini dapat direalisasikan dengan baik, maka tujuan program dan kegiatan juga akan tercapai secara maksimal.

Berdasarkan Indikator Kinerja tersebut di atas beserta kelompok sasaran yang ingin dicapai, maka dana indikatif beserta sumbernya untuk digunakan pada tahun anggaran 2022 selain diharapkan bersumber dari

1. Dana alokasi APBD Kabupaten;
2. Dana dari APBD Provinsi; dan
3. Dana sharing melalui dana dekonsentrasi, dana hibah atau dana lainnya dari alokasi APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
4. Dana *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang berasal dari perusahaan.

Dengan mempertimbangkan sumber dana dari APBD II sangat terbatas alokasinya dalam menjalankan program/kegiatan yang ada, maka untuk lebih menjamin kelancaran pelaksanaan program sangat diharapkan adanya sumber dana, baik yang bersumber dari alokasi APBD I maupun alokasi APBN yang jumlahnya lebih besar berupa penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dikatakan bahwa jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintah provinsi. Dengan demikian diharapkan kucuran dana untuk untuk membiayai program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan agar nantinya seluruh program/kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.